Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DARI KEBUNTUAN KONSTITUANTE KE DEMOKRASI TERPIMPIN: ANALISIS HISTORIS KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II (1956–1957)

Muhamad Adam Fauzan[1], Eko Ribawati[2]

[12] Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

adamfzofficial@gmail.com
eko.ribawati@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini membahas dinamika politik Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957) dengan fokus pada kebuntuan Konstituante, krisis politik, serta kegagalan sistem demokrasi parlementer yang menjadi pemicu munculnya gagasan Demokrasi Terpimpin. Latar belakang penelitian ini berangkat dari ketidakstabilan politik pasca-Pemilu 1955 yang menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dasar negara dan memperlemah legitimasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap sumber sekunder, seperti arsip, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsi representatif mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap sistem parlementer dan mendorong munculnya kebutuhan akan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan terpusat. Gagasan Demokrasi Terpimpin kemudian menjadi alternatif politik yang dianggap mampu menyatukan arah revolusi nasional. Temuan ini menegaskan bahwa periode tersebut merupakan titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Ali Sastroamidjojo II, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Krisis Politik

A B S T R A C T

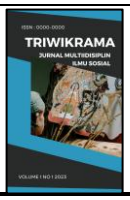
This study examines Indonesia's political dynamics during the Ali Sastroamidjojo II Cabinet (1956–1957), focusing on the Constituent Assembly deadlock, political crisis, and the failure of parliamentary democracy that triggered the emergence of Guided Democracy. The research stems from the political instability following the 1955 General Election, which led to difficulties in reaching consensus on the state's foundational ideology and weakened governmental legitimacy. Using a historical-qualitative approach and literature study method, this research draws on primary and secondary sources, including archives, official documents, and previous scholarly works. The findings reveal that the inability of political institutions to function representatively resulted in a crisis of confidence in the parliamentary system and encouraged the search for a more centralized and stable form of governance. The concept of Guided Democracy subsequently emerged as a political alternative considered capable of unifying the direction of the national revolution. This period thus represents a crucial turning point in the evolution of Indonesia's democratic experience.

***Keywords**: Ali Sastroamidjojo II, Guided Democracy, Parliamentary Democracy, Political Crisis*

1. PENDAHULUAN

*Corresponding author
E-mail addresses: adamfzofficial@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Periode demokrasi parlementer di Indonesia (1950–1959) merupakan fase paling dinamis sekaligus penuh ketegangan dalam sejarah politik nasional. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Indonesia berupaya menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan konstitusi liberal. Namun, sistem multipartai yang terlalu kompleks, pertentangan ideologi politik yang tajam, serta lemahnya efektivitas lembaga-lembaga negara menyebabkan seringnya pergantian kabinet dan ketidakstabilan pemerintahan. Dalam situasi inilah demokrasi parlementer Indonesia mulai menghadapi krisis legitimasi yang serius.

Salah satu puncak krisis tersebut tampak pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957). Kabinet ini berdiri di tengah meningkatnya ketegangan politik antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis, serta menghadapi tekanan berat dari dinamika daerah yang mulai menuntut otonomi luas. Kebuntuan Konstituante yang gagal menyepakati dasar negara menambah kerumitan politik nasional. Menurut Maulida dan Abdurakhman (2021), perdebatan ideologis yang berlangsung dalam sidang Konstituante mencerminkan fragmentasi politik dan lemahnya komitmen terhadap kompromi nasional, sehingga mempercepat kejatuhan sistem demokrasi parlementer.

Keadaan ini semakin diperparah oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dan partai politik. Feith (1962) dalam *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* menjelaskan bahwa kegagalan demokrasi parlementer bukan semata akibat struktur kelembagaan, tetapi juga lemahnya budaya politik yang mendukung demokrasi konstitusional. Kondisi semacam ini membuka jalan bagi munculnya gagasan alternatif dari Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin, yang berupaya menggantikan demokrasi liberal dengan sistem yang dianggap lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

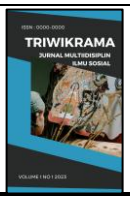
Pemilihan tema ini didasarkan pada urgensi untuk memahami bagaimana krisis politik dan kebuntuan konstitusional pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi landasan historis bagi transisi menuju Demokrasi Terpimpin. Periode ini tidak hanya penting karena menandai berakhirnya demokrasi parlementer, tetapi juga karena menjadi titik balik pembentukan pola kepemimpinan dan sistem politik baru yang berpusat pada figur Presiden Soekarno. Sebagaimana dikemukakan Nugroho (2019), gagasan Demokrasi Terpimpin muncul sebagai kompromi antara kebutuhan stabilitas politik dengan keinginan Soekarno untuk memperkuat peran kepemimpinan nasional di tengah disintegrasi politik dan ideologis.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana dinamika kebuntuan Konstituante dan krisis politik yang terjadi selama masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957)? (2) Apa faktor-faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem demokrasi parlementer pada periode tersebut? (3) Bagaimana gagasan Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons terhadap instabilitas politik dan pemerintahan masa itu?

1. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (*historical method*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada rekonstruksi dan analisis peristiwa masa lalu, khususnya dinamika politik pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957) yang berperan penting dalam peralihan dari sistem demokrasi parlementer menuju Demokrasi Terpimpin. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna, konteks, serta hubungan sebab-akibat di balik peristiwa politik yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Gottschalk (1986), penelitian sejarah bertujuan untuk memahami masa lalu melalui proses pengumpulan, pengujian, dan penafsiran data sejarah secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang obyektif terhadap fakta.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Metode sejarah dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian ini yang menekankan analisis terhadap sebab-sebab historis dari kebuntuan Konstituante, krisis politik, dan munculnya gagasan Demokrasi Terpimpin. Tahapan penelitian dilakukan secara berurutan melalui empat proses utama yakni *heuristik* (pengumpulan sumber), *kritik sumber*, *interpretasi*, dan *historiografi*. Tahap heuristik dilakukan dengan menelusuri sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti arsip pemerintahan, pidato politik Presiden Soekarno, notulen sidang Konstituante, serta surat kabar periode 1956–1957 seperti Harian Indonesia Raya dan Suluh Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas dinamika politik masa demokrasi parlementer.

Kritik sumber dilakukan dengan cara menilai keaslian dan kredibilitas data melalui dua tahap, yakni kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal digunakan untuk memeriksa keaslian dokumen dan waktu penerbitannya, sedangkan kritik internal digunakan untuk menilai keakuratan isi serta bias ideologis dalam setiap sumber. Setelah sumber dinilai valid, tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah berdasarkan konteks sosial, politik, dan ideologis masa itu. Proses ini dilakukan secara *deskriptif-interpretatif* agar setiap peristiwa dapat dipahami tidak hanya sebagai rangkaian kronologis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika transisi politik Indonesia yang kompleks.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), karena objek penelitian merupakan peristiwa masa lampau yang tidak dapat diamati langsung. Melalui teknik ini, berbagai data diperoleh dari literatur akademik, arsip nasional, dan sumber digital seperti repositori universitas. Menurut Kuntowijoyo (2013), studi kepustakaan merupakan instrumen utama dalam penelitian sejarah karena memungkinkan peneliti menilai peristiwa masa lalu melalui pembacaan kritis terhadap sumber tertulis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis *deskriptif-interpretatif*, di mana peneliti berupaya menghubungkan peristiwa politik, tindakan aktor, dan kondisi struktural yang melingkupi krisis politik periode tersebut.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

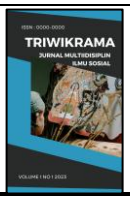
A. Kebuntuan Konstituante dan Krisis Representasi Politik

Kebuntuan Konstituante merupakan titik awal dari runtuhnya kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi parlementer. Berdasarkan hasil telaah dokumen sidang tahun 1956–1959, mayoritas perdebatan terkunci pada persoalan ideologi dasar negara, antara kubu Islam yang menghendaki kembali pada Piagam Jakarta dan kubu nasionalis yang mempertahankan Pancasila (Ruhdiara dkk., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga politik yang seharusnya menjadi wadah kompromi justru berubah menjadi arena pertarungan identitas. Seperti ditunjukkan Feith (1962), kegagalan Konstituante tidak hanya mencerminkan konflik ideologis, tetapi juga krisis representasi politik: para anggota lebih menjadi corong partai daripada penyambung aspirasi rakyat. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menurun tajam.

Tabel 1. Polarisasi Ideologis Anggota Konstituante 1956-1958

*Corresponding author
E-mail addresses: adamfzofficial@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Golongan Politik	Jumlah Kursi	Presentase	Orientasi Politik
Nasionalis (PNI, Parkindo, Partai Katolik)	216	42,0	Pancasila
Islam (PSII, NU, Masyumi)	230	44,8	Piagam Jakarta
Komunis (PKI dan Afiliasi)	39	7,6	Sosialis
Independen (Lain-lain)	29	5,6	Netral
Total	514	100	-

(Sumber: Diolah dari arsip Konstituante dan hasil Pemilu 1955).

Tabel ini memperlihatkan ketegangan struktural yang hampir seimbang antara kubu Islam dan nasionalis. Tidak ada satu pun kelompok yang mampu mencapai dua pertiga suara yang disyaratkan oleh UUDS 1950 untuk mengesahkan konstitusi baru. Akibatnya, sidang-sidang berjalan stagnan dan perdebatan berulang tanpa arah penyelesaian. Secara kritis, kegagalan Konstituante dapat dipahami bukan hanya sebagai kegagalan teknis dalam membuat konstitusi, melainkan kegagalan ideologis bangsa untuk menyepakati makna politik kemerdekaan itu sendiri. Gagasan demokrasi Barat yang berbasis kompromi partai ternyata tidak kompatibel dengan struktur sosial-politik Indonesia yang masih menekankan patronase, loyalitas, dan kepemimpinan karismatik (Kahin, 2003).

B. Krisis Politik Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Disintegrasi Nasional

Hasil analisis terhadap risalah sidang DPR dan pidato kabinet memperlihatkan bahwa Kabinet Ali II menghadapi tekanan berat dari tiga arah:

1. Ketegangan antarpartai akibat sistem koalisi yang rapuh.
2. Ketegangan pusat-daerah akibat munculnya PRRI-Permesta.
3. Ketegangan sipil-militer karena meningkatnya peran politik Angkatan Darat.

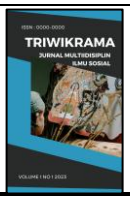
Menurut Maulida (2018), sistem parlementer di Indonesia tidak mampu membangun stabilitas karena partai-partai lebih sibuk memperjuangkan posisi menteri daripada kebijakan substantif. Kabinet Ali II hanya bertahan sekitar 15 bulan dan jatuh karena hilangnya dukungan mayoritas di parlemen. Secara sosial, periode ini juga memperlihatkan meningkatnya sentimen kedaerahan. Daerah-daerah seperti Sumatra dan Sulawesi merasa terpinggirkan dalam distribusi ekonomi nasional. Dari arsip PRRI-Permesta, terlihat bahwa ketidakpuasan terhadap pusat bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan keadilan politik (Faishal, 2018). Krisis ini menandakan pergeseran: ketika demokrasi gagal menjamin stabilitas, muncul legitimasi baru bagi intervensi militer dan tokoh karismatik seperti Soekarno. Dengan kata lain, krisis politik membuka jalan bagi personalisasi kekuasaan.

C. Lahirnya Gagasan Demokrasi Terpimpin sebagai Solusi Politis

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gagasan Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons langsung terhadap krisis politik 1956–1957. Pidato Soekarno berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (1957) menjadi tonggak ideologis di mana ia menegaskan bahwa demokrasi liberal adalah produk Barat yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia (Nugroho, 2019). Soekarno mengusulkan model demokrasi yang berjiwa gotong royong" dengan menempatkan presiden sebagai pemimpin tertinggi revolusi. Secara retoris, konsep ini tampak ideal, tetapi secara struktural, ia mengandung benih otoritarianisme. Feith (1962) menyebutnya sebagai peralihan dari *pluralisme* ke *personalisme* kekuasaan. Dari perspektif sejarah politik, lahirnya Demokrasi Terpimpin menandai pergeseran paradigma kekuasaan:

- Dari *rule by parties* (pemerintahan oleh partai)
- Menuju *rule by a leader* (pemerintahan oleh figur tunggal).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Paradigma ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil akumulasi dari krisis yang terus menumpuk sejak masa Kabinet Ali II. Dengan demikian, gagasan Demokrasi Terpimpin harus dibaca bukan hanya sebagai inovasi politik, tetapi juga sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem sebelumnya.

PEMBAHASAN

A. Kebuntuan Konstituante sebagai Cerminan Krisis Politik dan Kelemahan Demokrasi Parlementer pada Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kebuntuan Konstituante pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957) menjadi indikator mendasar dari krisis politik yang menandai kemunduran sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Konstituante yang dibentuk setelah Pemilu 1955 diharapkan dapat menyusun Undang-Undang Dasar yang baru dan memperkuat fondasi politik nasional. Namun, lembaga ini gagal mencapai konsensus mengenai dasar negara, terutama antara kelompok Islam dan nasionalis (Ruhdiara dkk., 2021). Kegagalan tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme kompromi dalam sistem parlementer yang multipartai.

Menurut Herbert Feith (1962), krisis ini merupakan simptom dari sistem politik yang terfragmentasi oleh kepentingan ideologis dan tidak memiliki kapasitas integratif. Feith menilai bahwa partai-partai politik lebih mementingkan perebutan kekuasaan jangka pendek daripada membangun fondasi politik jangka panjang. Pendapat ini diperkuat oleh Audrey R. Kahin (2003), yang menyebut bahwa kegagalan kabinet pada masa itu disebabkan oleh tidak adanya partai dominan yang mampu menjadi penyeimbang antarideologi. Dengan demikian, kebuntuan Konstituante mencerminkan kegagalan sistem parlementer untuk mengakomodasi pluralisme politik bangsa yang baru merdeka.

Beberapa ahli seperti Ricklefs (2017) menilai bahwa perpecahan politik tersebut juga dipengaruhi oleh belum matangnya kultur demokrasi di Indonesia pascakolonial. Dalam pandangan Ricklefs, demokrasi parlementer diterapkan tanpa adanya basis sosial yang kuat, sehingga elite politik lebih sibuk mempertahankan identitas partainya masing-masing daripada memperjuangkan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan analisis Maulida & Abdurakhman (2021), yang menilai bahwa Pemilu 1955 meskipun demokratis secara procedural justru memperdalam fragmentasi politik. Dengan meninjau berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebuntuan Konstituante bukan hanya kegagalan kelembagaan, melainkan juga akibat dari lemahnya orientasi nasional dalam sistem parlementer. Faktor ini menegaskan bahwa pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, demokrasi parlementer telah kehilangan efektivitasnya sebagai sistem pemerintahan yang stabil.

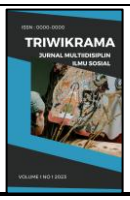
B. Kegagalan Sistem Demokrasi Parlementer sebagai Pemicu Gagasan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno

Kegagalan sistem demokrasi parlementer yang tampak pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi latar bagi munculnya gagasan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Sistem parlementer dianggap tidak mampu menjamin stabilitas pemerintahan dan memperkuat kesatuan nasional. Menurut Cornelius Bayu Astana & Rhoma Dwi Aria Yuliantri (2025), wacana publik pada masa itu menunjukkan meningkatnya kelelahan sosial akibat seringnya pergantian kabinet dan perdebatan ideologis yang tidak berujung. Soekarno menilai bahwa demokrasi liberal adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan karakter gotong royong bangsa Indonesia.

Herbert Feith (1962) menjelaskan bahwa gagasan Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi politik terhadap anarki parlementer yang membuat negara tidak dapat menjalankan fungsinya

*Corresponding author
E-mail addresses: adamfzofficial@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



secara efektif. Dalam pandangannya, Soekarno berusaha mengembalikan arah revolusi nasional dengan menempatkan presiden sebagai simbol pemersatu. Nugroho (2019) juga menafsirkan bahwa pemikiran Soekarno mengenai kepemimpinan terarah (*Guided Leadership*) lahir dari kesadaran bahwa demokrasi liberal gagal menghasilkan keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas nasional.

Namun, beberapa ahli memberikan penilaian berbeda. Kahin (2003) menganggap bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan kompromi politik antara kebutuhan akan stabilitas dan ambisi kekuasaan Soekarno. Sedangkan Ricklefs (2017) menekankan bahwa sistem ini tumbuh dari konteks sosial-politik yang menuntut adanya figur pemimpin yang kuat untuk menjaga integrasi bangsa. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan, seluruh analisis tersebut sepakat bahwa munculnya gagasan Demokrasi Terpimpin tidak terlepas dari kegagalan sistem parlementer yang diperkuat oleh krisis politik masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Gagasan Demokrasi Terpimpin pada akhirnya menjadi respons ideologis terhadap kelelahan politik bangsa, serta wujud pencarian sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial Indonesia

C. Demokrasi Terpimpin sebagai Solusi Ideologis dan Politik terhadap Kebuntuan Sistem Parlementer

Demokrasi Terpimpin yang secara resmi diperkenalkan Soekarno pada tahun 1957 merupakan sintesis antara kebutuhan akan stabilitas politik dan pencarian bentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam konteks historis, gagasan ini berakar dari pengalaman krisis pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, di mana sistem parlementer gagal menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif.

John D. Legge (1985) berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin adalah konsekuensi logis dari stagnasi politik yang terjadi sebelumnya. Ia menilai sistem ini bukan sekadar bentuk kekuasaan sentralistik, melainkan refleksi atas keinginan Soekarno untuk menciptakan demokrasi yang berlandaskan musyawarah nasional. Pendapat Legge sejalan dengan pandangan Vickers (2005), yang melihat Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk *"paternal democracy"* demokrasi dengan figur pemimpin tunggal yang berperan sebagai penuntun moral dan politik bangsa.

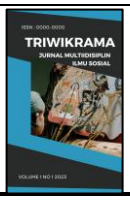
Namun, pandangan tersebut berbeda dengan Feith (1962) dan Kahin (2003), yang memandang Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk kemunduran dari demokrasi liberal menuju sistem otoriter. Menurut Feith, sistem ini menegasikan prinsip *checks and balances* karena kekuasaan terlalu terpusat di tangan presiden. Sementara itu, Kahin menilai bahwa sistem tersebut menciptakan ketergantungan politik pada figur Soekarno dan menghambat perkembangan institusi demokrasi. Meskipun demikian, dalam konteks keindonesiaan, Soekarno berupaya menampilkan Demokrasi Terpimpin sebagai solusi ideologis terhadap kegagalan parlementarisme. Nugroho (2019) menegaskan bahwa Demokrasi Terpimpin harus dipahami sebagai upaya mengembalikan orientasi revolusi yang sempat kehilangan arah akibat konflik partai-partai politik. Dengan menggabungkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan hasil dari *dialektika historis* antara idealisme stabilitas politik dan kenyataan disfungsi demokrasi parlementer.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957) merupakan puncak ketegangan politik akibat kebuntuan Konstituante dalam menetapkan dasar negara. Gagalnya kompromi antarfaksi memperlihatkan lemahnya sistem demokrasi parlementer yang tidak mampu menyalurkan aspirasi politik secara efektif. Ketidakstabilan pemerintahan, pertentangan ideologi, dan meningkatnya

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



tekanan sosial-ekonomi menjadi faktor utama yang mempercepat kehancuran sistem tersebut. Krisis politik ini memicu munculnya gagasan baru tentang perlunya kepemimpinan yang kuat dan terpusat, yang kemudian membuka jalan bagi lahirnya Demokrasi Terpimpin. Proses ini menandai pergeseran mendasar dari demokrasi liberal menuju sistem yang berorientasi pada stabilitas dan kendali negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas penggunaan sumber primer dan mengkaji lebih dalam faktor sosial, ekonomi, serta hubungan pusat–daerah yang memengaruhi krisis politik tahun 1956–1957. Penelitian berikutnya juga diharapkan menelaah peran militer dan dinamika antarkelompok politik secara lebih komprehensif. Selain itu, penguatan lembaga politik dan budaya kompromi perlu terus diperhatikan agar perkembangan demokrasi Indonesia ke depan dapat lebih stabil

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Pemilihan Umum 1955. (1955). Dokumen resmi hasil Pemilu 1955. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Astana, C. B., & Yuliantri, R. D. A. (2025). Political discourse of Indonesian Raya daily newspaper in Indonesian political public space 1955–1957. *Diakronika: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah,* 25(1), 1–20.

Faisal, H. (2018). Hitam putih PRRI-Permesta: Konvergensi dua kepentingan berbeda 1956–1961. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 65–84.

Feith, H. (1962*). The decline of constitutional democracy in Indonesia.* Ithaca, NY: Cornell University Press.

Hilmy Maulida, F., & Abdurakhman, A. (2021). Rethinking the 1955 election: Political struggle and abandoned optimism. *Repository UI,* 1–18.

Kahin, A. R. (2003). *Democracy to guided democracy: Indonesian politics 1950–1959.* Singapore: NUS Press.

Kuntowijoyo. (2013). *Metodologi sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Legge, J. D. (1985). *Sukarno: A political biography.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nugroho, Y. A. (2019). Soekarno's political thinking about guided democracy: Between leadership and authoritarianism. *Jurnal Politik,* 5(2), 210–229.

Ricklefs, M. C. (2017*). A history of modern Indonesia* since c. 1200 (5th ed.). London: Palgrave Macmillan.

Rumondang, R., & Ruhdiara, D. (2021). Perdebatan Badan Konstituante mengenai dasar negara pada era 1955–1959. Jurnal Historis, 9(2), 45–58.

Vickers, A. (2005). A history of modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.

Hilmy Maulida, F. (2018). Hitam putih PRRI-Permesta: Konvergensi dua kepentingan berbeda 1956–1961. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 65–84.

*Corresponding author
E-mail addresses: adamfzofficial@gmail.com